



Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kota Semarang Periode 2020-2024)

Meyva Lutfiana Putri¹, Rina Rosia²

^{1, 2}) Fakultas Ekonomi dan Bsnis Islam, UIN Salatiga, Salatiga, Indonesia

Submitted: 26-05-2026 | Review 29-06-2026 | Revision 24-07-2026 | Accepted 27-07-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang periode 2020–2024 menggunakan analisis rasio keuangan daerah yang meliputi rasio kemandirian, efektivitas, pertumbuhan, keserasian, dan desentralisasi fiskal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi APBD Kota Semarang tahun 2020–2024. Rentang waktu lima tahun tersebut memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perubahan, tren, dan konsistensi kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang, sehingga hasil analisis rasio keuangan daerah meliputi rasio kemandirian, efektivitas, pertumbuhan, keserasian, dan desentralisasi fiskal dapat menghasilkan evaluasi yang lebih objektif terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang secara umum berada pada kondisi baik. Rasio kemandirian berada pada pola delegatif yang menunjukkan rendahnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Rasio efektivitas tergolong efektif karena realisasi PAD mampu mencapai target yang ditetapkan. Rasio pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan positif meskipun mengalami fluktuasi akibat pandemi dan pemulihan ekonomi. Rasio keserasian menunjukkan belanja operasional masih lebih besar dibandingkan belanja modal, namun belanja modal meningkat pasca pandemi. Selain itu, rasio desentralisasi fiskal menunjukkan peningkatan dari kategori baik menjadi sangat baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki kemampuan fiskal yang cukup baik dalam mendukung otonomi daerah dan pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: Kinerja keuangan daerah, Rasio keuangan, PAD, Desentralisasi fiskal.

Abstract: This study aims to analyze the financial performance of the Semarang City Government for the 2020–2024 period using regional financial ratio analysis, including the ratios of independence, effectiveness, growth, harmony, and fiscal decentralization. The research method used is descriptive quantitative, utilizing secondary data in the form of the 2020–2024 Semarang City Regional Budget realization report. This five-year period provides a comprehensive overview of changes, trends, and consistency in the Semarang City Government's financial performance. Therefore, the results of the regional financial ratio analysis including the ratios of independence, effectiveness, growth, harmony, and fiscal decentralization can produce a more objective evaluation of the regional government's ability to manage regional finances. The results indicate that the financial performance of the Semarang City Government is generally in good condition. The independence ratio is in a delegative pattern, indicating low dependence on the central government. The effectiveness ratio is considered effective because the realization of Regional Original Revenue (PAD) is able to achieve the set target. The growth ratio shows positive growth despite fluctuations due to the pandemic and economic recovery. The harmony ratio shows that operational expenditures are still greater than capital expenditures, but capital expenditures have increased post-pandemic. In addition, the fiscal decentralization ratio shows an increase from the

¹E-mail: meyva_lutfi@gmail.com

²E-mail: rinarosia@uinsalatiga.ac.id

good category to very good. The research results show that the Semarang City Government has quite good fiscal capacity to support regional autonomy and sustainable development.

Keywords: *Regional financial performance, Financial ratios, Regional original revenue, Fiscal decentralization.*

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik merupakan sistem yang digunakan pemerintah dalam mengelola dan melaporkan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan keuangan pemerintah daerah menjadi alat penting dalam mengevaluasi keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan public (Mardiasmo, 2018). Selain itu, penelitian lain menjelaskan bahwa laporan keuangan daerah dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan fiskal pemerintah daerah melalui analisis rasio keuangan (A & Maylani, 2024). Penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik mampu meningkatkan efektivitas pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengelola belanja daerah, dan mempertahankan stabilitas fiskal daerah”. Penelitian pada Jurnal EMBA menjelaskan bahwa analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan menggunakan rasio efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan kemandirian keuangan daerah (Ropa, 2016). Selain itu, penelitian dalam JMBI UNSRAT menyatakan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat sehingga tingkat kemandirian fiskalnya masih rendah (Satrio & Digdowiseiso, 2023). Penelitian lain pada Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang belum stabil dapat memengaruhi efektivitas pembangunan daerah (Machmud, 2019).

Semarang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi pada sektor perdagangan, industri, jasa, dan transportasi. Berdasarkan data BPS Kota Semarang, sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta konstruksi menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Semarang (BPS Kota Semarang, 2024). Data pada Kota Semarang Dalam Angka 2023 menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kota Semarang terus

berkembang seiring meningkatnya investasi dan pertumbuhan sektor jasa. Selain itu, penelitian pada Jurnal Ekonomi Pembangunan tentang Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang menjelaskan bahwa perkembangan sektor perdagangan dan jasa memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan PAD Kota Semarang (Saputro et al., 2025).

Namun demikian, tingginya aktivitas ekonomi di Kota Semarang juga diiringi dengan berbagai tantangan dan gejolak ekonomi yang memengaruhi kondisi keuangan daerah. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi akibat pembatasan mobilitas masyarakat dan menurunnya aktivitas perdagangan, hotel, restoran, transportasi, dan jasa. Berdasarkan data Indikator Ekonomi Kota Semarang 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Semarang mengalami kontraksi sebesar -1,85% (BPS Kota Semarang, 2021). Penelitian pada Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi STIESIA tentang Dampak COVID-19 terhadap PAD menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan efektivitas penerimaan pajak daerah dan meningkatnya tekanan fiskal pemerintah daerah. Selain itu, penelitian pada sebelumnya menyatakan bahwa penurunan PAD selama pandemi menyebabkan ketidakseimbangan fiskal pada sebagian besar pemerintah daerah (Dude et al., 2014).

Pandemi COVID-19 juga menyebabkan Pemerintah Kota Semarang melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan perubahan struktur pengelolaan APBD karena pemerintah daerah harus memprioritaskan belanja kesehatan dan bantuan sosial dibandingkan belanja Pembangunan. Kebijakan fiskal selama pandemi memengaruhi kualitas pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, Kebijakan Fiskal Daerah Saat Pandemi menyatakan bahwa pandemi COVID-19 meningkatkan tekanan terhadap stabilitas fiskal daerah karena pemerintah harus menjaga keseimbangan antara pemulihan ekonomi dan keberlanjutan keuangan daerah. Penelitian lain pada Jurnal Akuntansi Aktual tentang Refocusing Anggaran Daerah juga menjelaskan bahwa realokasi anggaran selama pandemi menyebabkan penurunan proporsi belanja modal pada banyak pemerintah daerah di Indonesia (Yuniza et al., 2022).

Selain pandemi, Kota Semarang juga menghadapi persoalan banjir rob di wilayah pesisir utara Kota yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah. Permasalahan rob menyebabkan kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas perdagangan, serta meningkatnya kebutuhan anggaran pemerintah daerah

dalam pembangunan sistem drainase dan pengendalian banjir. Penelitian sebelumnya tentang Dampak Rob di Kota Semarang menjelaskan bahwa banjir rob berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir Kota Semarang (Kusumaningsih et al., 2023). Selain itu, penelitian lain tentang Kerentanan Wilayah Pesisir Semarang menyatakan bahwa banjir rob meningkatkan kebutuhan pembangunan infrastruktur perkotaan dan drainase kota. Penelitian lain juga menjelaskan bahwa peningkatan banjir rob di Kota Semarang dapat memengaruhi stabilitas aktivitas ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah.

Perkembangan Kota Semarang sebagai kota metropolitan juga menyebabkan kebutuhan belanja daerah terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah daerah harus menyediakan anggaran untuk pembangunan jalan, transportasi publik, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki proporsi belanja operasional yang lebih besar dibandingkan belanja modal sehingga pembangunan infrastruktur belum optimal. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kemandirian fiskal menyebabkan pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan daerah (Romadhan, 2024). Penelitian lain menyebutkan bahwa Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi menjelaskan bahwa belanja modal memiliki pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan publik daerah (Waryanto, 2024).

Memasuki tahun 2021 hingga 2024, kondisi ekonomi Kota Semarang mulai mengalami pemulihan secara bertahap. Pemerintah Kota Semarang mulai melakukan inovasi dalam pengelolaan PAD melalui digitalisasi pajak daerah, penggunaan sistem pembayaran elektronik, dan peningkatan pengawasan pajak daerah. Digitalisasi sistem perpajakan daerah mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan daerah. Selain itu, inovasi pelayanan publik berbasis digital dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah dan kualitas pelayanan pemerintah daerah. Penelitian lain pada Jurnal Kebijakan Publik tentang Pemulihan Ekonomi Pascapandemi menunjukkan bahwa pemulihan aktivitas ekonomi pascapandemi berdampak terhadap meningkatnya kemampuan fiskal pemerintah daerah (Barraq et al., 2024).

Berdasarkan berbagai fenomena ekonomi, tekanan fiskal, dan dinamika pembangunan daerah yang terjadi di Kota Semarang selama periode 2020–2024, penelitian mengenai analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan kemandirian fiskal, efektivitas pengelolaan PAD, pertumbuhan keuangan daerah, serta keseimbangan struktur belanja daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi dan kebutuhan pembangunan perkotaan yang terus meningkat. Penelitian pada sebelumnya menjelaskan bahwa rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara komprehensif (Kartika, 2023). Selain itu, penelitian lain menyatakan bahwa evaluasi kinerja keuangan daerah sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD dan kualitas pembangunan daerah (Arifah Nasution et al., 2023).

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar teoretis terkait analisis kinerja keuangan pemerintah daerah serta menunjukkan posisi penelitian dalam konteks studi sebelumnya. Kinerja keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik (Arifah Nasution et al., 2023). Dalam praktiknya, analisis rasio keuangan menjadi pendekatan yang banyak digunakan karena mampu memberikan gambaran kondisi fiskal daerah secara komprehensif, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian yang menunjukkan bahwa rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Lebih lanjut, dalam konteks pemerintah daerah di Jawa Tengah, penelitian lain menunjukkan bahwa meskipun kinerja keuangan daerah mengalami peningkatan, tingkat kemandirian fiskal masih tergolong rendah akibat tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat (Hidayatuzzahroh & Lisiantara, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa analisis kinerja keuangan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mempertimbangkan berbagai indikator secara bersamaan agar menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif, khususnya dalam konteks Kota Semarang periode 2020–2024.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam mengelola keuangan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah analisis rasio keuangan daerah yang meliputi rasio kemandirian, efektivitas, desentralisasi fiskal, pertumbuhan, serta keserasian belanja. Rasio kemandirian digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan melalui Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan transfer, sedangkan rasio efektivitas digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD. Dalam penelitian empiris, penggunaan rasio keuangan terbukti mampu memberikan gambaran (Hanik & Karyanti, 2014) kondisi keuangan daerah secara menyeluruh, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian pada pemerintah daerah Jawa Tengah yang menggunakan berbagai indikator rasio keuangan untuk menilai kinerja fiskal daerah (Wijayanti & Fuad, 2025). Namun demikian, analisis terhadap struktur belanja daerah menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih didominasi oleh belanja operasional dibandingkan belanja modal, yang berpotensi menghambat pembangunan jangka panjang jika tidak diimbangi dengan alokasi investasi yang memadai. Oleh karena itu, interpretasi terhadap rasio keuangan harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah secara menyeluruh..

Kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa analisis rasio keuangan merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam menilai kondisi fiskal daerah. Penelitian yang secara spesifik mengkaji Kota Semarang menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah tergolong baik, dimana rasio efektivitas PAD berada pada kategori sangat efektif dan efisien, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian yang dapat diakses melalui (Sumastuti et al., 2020). Namun demikian, penelitian pada wilayah yang lebih luas seperti Kabupaten Semarang menunjukkan hasil yang berbeda, dimana rasio kemandirian masih tergolong rendah dan ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup tinggi. Selain itu, penelitian lain pada pemerintah daerah di Jawa Tengah juga menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah masih menghadapi tantangan dalam hal efisiensi dan optimalisasi PAD meskipun beberapa indikator seperti efektivitas menunjukkan hasil yang cukup baik (Wijayanti & Fuad, 2025). Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian, yaitu masih terbatasnya kajian yang menganalisis kinerja keuangan daerah

secara komprehensif dengan menggunakan seluruh rasio keuangan dalam periode terbaru, sehingga penelitian pada Kota Semarang tahun 2020–2024 menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih relevan dan aktual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif, yaitu mengolah dan menghitung rasio-rasio keuangan sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis pengelolaan keuangan daerah khususnya Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2024. Analisis data dilakukan dengan menggunakan tahapan mereduksi data, penyajian data, dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi sebagai proses interpretasi data untuk menemukan pola, korelasi, serta makna dari fenomena yang diteliti. (Sugiyono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran Rasio

Tabel 1. Pengukuran Rasio Keuangan

Rasio	Indicator	Rumus Perhitungan Dan Referensi
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	a. 0%-25%, tergolong rendah sekali dengan pola instruktif.	Rumus: $\frac{PADn}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$ Keterangan: PAD=Pendapatan Asli Daerah n=tahun (Christia & Ispriyarso, 2019)
	b. 25%-50%, tergolong rendah dengan pola konsutatif.	
	c. 50%-75%, tergolong sedang dengan pola partisipatif.	
	d. 75%-100%, tergolong tinggi dengan pola delegatif.	
Rasio Efektivitas	a. Jika nilai yang diperoleh kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.	Rumus : $\frac{Realisasi PADn}{Anggaran PADn} \times 100\%$ Keterangan: PAD=Pendapatan Asli Daerah n=tahun (Smith & Desilasari, 2015)
	b. Jika nilainya sama dengan 100% berarti efektivitas seimbang	

Rasio Pertumbuhan	a. Jika r bernilai negatif (-) maka dapat dikatakan pertumbuhan mengalami penurunan. b. Jika r bernilai positif (+) maka dapat dikatakan bahwa dari pertumbuhan sebuah PAD meningkat dari tahun sebelumnya.	Rumus : $r = \frac{P_n - P_o}{P_o}$ Keterangan: r = Rasio Pertumbuhan P_n= Pertumbuhan pada tahun ke-n P_o= Pertumbuhan pada awal tahun (Smith & Desilasari, 2015)
Rasio Desentralisasi Fiskal	a. 0% - 10% : Sangat Rendah b. 10.01%-20% : Rendah c. 20.01-30% : Sedang d. 30.01-40% : Cukup e. 40.01-50% : Tinggi >50% Sangat Tinggi	Rumus: $\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{realisasi}}{100\% \times \text{Total Pendapatan}}$ (Christia & Ispriyarso, 2019)

Sumber: Data APBD 2020-2024 diolah (2026)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Semarang tahun 2020–2024, diketahui bahwa rasio kemandirian berada pada pola hubungan delegatif dengan nilai yang cenderung tinggi dan fluktuatif. Pada tahun 2020 rasio kemandirian sebesar 121,30%, kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 102,82%, dan kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar 105,07%. Selanjutnya, pada tahun 2023 rasio meningkat signifikan menjadi 149,67% dan sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 146,47%, namun tetap berada pada kategori delegatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki tingkat kemandirian fiskal yang sangat baik karena mampu membiayai kebutuhan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tingkat ketergantungan yang rendah terhadap pemerintah pusat. Hasil tersebut sejalan dengan sebelumnya yang menyatakan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang secara umum tergolong baik meskipun sempat mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19 (Karina & Wibowo, 2022).

Fluktuasi rasio kemandirian tersebut dipengaruhi oleh fenomena ekonomi yang terjadi selama periode penelitian. Pada tahun 2020 pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi, terutama pada sektor perdagangan, hotel, restoran,

transportasi, dan jasa sehingga berdampak pada kondisi keuangan daerah. Namun, pada tahun 2021 hingga 2022 kondisi ekonomi mulai pulih seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Peningkatan rasio yang cukup tinggi pada tahun 2023 dan tetap stabil pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Kota Semarang semakin kuat, didukung oleh meningkatnya aktivitas industri, perdagangan, investasi, dan jasa perkotaan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan rasio kemandirian keuangan daerah sebelum dan saat pandemi COVID-19 pada pemerintah daerah di Jawa Tengah (Ahsanul Habibi et al., 2021). Selain (Wijayanti & Fuad, 2025) juga menyatakan bahwa kemandirian fiskal pemerintah daerah di Jawa Tengah pada periode pascapandemi menunjukkan kondisi yang sangat baik akibat meningkatnya kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri.

Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Semarang

Tahun	Realisasi PAD	Pendapatan Transfer	Rasio	Keterangan
2020	2.024.537.808.307	1.669.101.931.826	121,29%	Delegatif
2021	2.385.944.758.477	2.320.535.370.128	102,82%	Delegatif
2022	2.545.991.747.658	2.423.149.928.403	105,07%	Delegatif
2023	2.835.150.144.867	1.894.259.369.905	149,67%	Delegatif
2024	2.885.774.306.352	1.970.290.635.589	146,47%	Delegatif

Sumber: Data APBD 2020-2024 diolah (2026)

Rasio Efektivitas

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Kota Semarang tahun 2020–2024, diketahui bahwa rasio efektivitas cenderung berada pada kategori efektif hingga sangat efektif. Pada tahun 2020 rasio efektivitas mencapai 107,15% dan termasuk kategori sangat efektif karena realisasi PAD mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2021 rasio menurun menjadi 91,50% akibat dampak pandemi COVID-19 yang masih memengaruhi aktivitas ekonomi daerah, terutama sektor perdagangan, hotel, restoran, dan jasa. Selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023 rasio efektivitas meningkat menjadi 99,70% dan 98,30% seiring membaiknya kondisi ekonomi masyarakat dan meningkatnya aktivitas usaha. Pada tahun 2024 rasio kembali menurun menjadi 91,23%, tetapi masih berada pada kategori efektif. Secara umum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang mampu merealisasikan PAD sesuai target yang ditetapkan sehingga pengelolaan pendapatan daerah tergolong baik dan optimal.

Fluktuasi rasio efektivitas selama periode penelitian dipengaruhi oleh berbagai fenomena ekonomi yang terjadi pada masing-masing tahun. Tahun 2020 meskipun terjadi pandemi COVID-19, Pemerintah Kota Semarang masih mampu mencapai tingkat efektivitas yang sangat tinggi karena adanya optimalisasi penerimaan pajak daerah dan penyesuaian target PAD selama masa pandemi. Tahun 2021 rasio mengalami penurunan karena pemulihan ekonomi belum berlangsung secara penuh sehingga beberapa sektor usaha masih mengalami perlambatan. Memasuki tahun 2022 dan 2023 kondisi ekonomi mulai pulih ditandai dengan meningkatnya aktivitas perdagangan, industri, transportasi, dan investasi sehingga realisasi PAD kembali meningkat dan mendekati target yang telah ditetapkan. Sementara itu, pada tahun 2024 rasio sedikit menurun karena target PAD yang semakin tinggi menyebabkan realisasi belum mampu melampaui target secara maksimal, meskipun masih berada dalam kategori efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas PAD dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi pendapatan serta kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

Tabel 3. Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah Kota Semarang

Tahun	Realisasi PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio	Keterangan
2020	2.024.537.808.307	1.889.508.813.000	107,15%	Efektif
2021	2.385.944.758.477	2.607.693.085.682	91,5%	Efektif
2022	2.545.991.747.658	2.553.643.457.802	99,70%	Efektif
2023	2.835.150.144.867	2.884.216.349.076	98,30%	Efektif
2024	2.885.774.306.352	3.163.314.524.405	91,23%	Efektif

Sumber: Data APBD 2020-2024 diolah (2026)

Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja operasional, dan belanja modal Kota Semarang tahun 2020–2024, diketahui bahwa seluruh komponen mengalami pertumbuhan positif meskipun bersifat fluktuatif. Pertumbuhan PAD tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 17,85% sebagai bentuk pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, kemudian melambat pada tahun 2022 sebesar 6,71%, meningkat kembali pada tahun 2023 sebesar 11,36%, dan menurun pada tahun 2024 menjadi 1,79%. Pertumbuhan belanja operasional cenderung stabil dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 11,33% yang menunjukkan meningkatnya aktivitas pelayanan publik dan kebutuhan pemerintahan daerah. Sementara itu,

pertumbuhan belanja modal mengalami lonjakan sangat tinggi pada tahun 2021 sebesar 88,32% akibat peningkatan pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi daerah, kemudian melambat pada tahun-tahun berikutnya karena pemerintah mulai menyesuaikan prioritas belanja daerah. Fluktuasi pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, pemulihan aktivitas perdagangan dan investasi, serta kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah. Meskipun demikian, pertumbuhan yang tetap positif menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjaga stabilitas fiskal daerah. Agar pertumbuhan tetap terjaga, pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi pajak dan retribusi daerah berbasis digital, meningkatkan investasi dan pengembangan UMKM, memperkuat sektor perdagangan dan jasa, serta mengalokasikan belanja modal secara lebih produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Tabel 4. Rekapitulasi Rasio Pertumbuhan pada PAD, Belanja Operasional, dan Belanja Modal Kota Semarang Tahun Anggaran 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	2.024.537.80 8.307	2.385.944.75 8.477	2.545.991.74 7.658	2.835.150.14 4.867	2.885.774.306.35 2
Pertumbuhan PAD	-	17,85%	6,71%	11,36%	1,79%
Belanja Operasional	3.429.805.61 1.104	3.781.987.19 8.191	3.813.761.58 7.856	4.245.924.12 1.376	4.391.696.983.72 8
Pertumbuhan Belanja Operasional	-	10,27%	0,84%	11,33%	3,43%
Belanja Modal	506.420.330. 795	953.669.847. 701	1.048.844.59 0.189	1.089.358.39 6.203	1.103.981.680.80 1
Pertumbuhan Modal	-	88,32%	9,98%	3,86%	1,34%

Sumber: Data APBD 2020-2024 diolah (2026)

Rasio Kesenjangan

Berdasarkan hasil perhitungan rasio keserasian belanja daerah Kota Semarang tahun 2020–2024, diketahui bahwa proporsi belanja operasional lebih dominan dibandingkan belanja modal. Rasio belanja operasional berada pada kisaran 78%–83% dari total belanja daerah, sedangkan rasio belanja modal berada pada kisaran 12%–21%.

Tingginya rasio belanja operasional menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah masih difokuskan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintah, seperti belanja pegawai, barang dan jasa, serta pelayanan publik sehari-hari. Sementara itu, rasio belanja modal yang berada di kisaran 20% menunjukkan bahwa pemerintah daerah juga tetap berupaya melakukan pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset daerah meskipun porsinya masih lebih kecil dibandingkan belanja operasional. Pada tahun 2020 rasio belanja modal masih relatif rendah sebesar 12,26% akibat adanya refocusing anggaran selama pandemi COVID-19, namun meningkat cukup signifikan pada tahun 2021 hingga 2024 sebagai bentuk percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan daerah pascapandemi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah mulai menyeimbangkan antara kebutuhan operasional pemerintahan dan pembangunan daerah melalui belanja modal. Agar keserasian belanja daerah menjadi lebih optimal, pemerintah daerah perlu meningkatkan proporsi belanja modal yang produktif dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, transportasi, fasilitas publik, dan digitalisasi layanan daerah, tanpa mengabaikan efektivitas belanja operasional. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa proporsi belanja modal yang lebih baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan (Dewi et al., 2026).

Tabel 5. Rasio Keserasian Belanja Operasional Kota Semarang

Tahun	Belanja Operasional	Total Belanja Daerah	Rasio
2020	3.429.805.611.104	4.128.912.545.760	83,07%
2021	3.781.987.198.191	4.764.045.946.156	79,38%
2022	3.813.761.587.856	4.871.946.697.040	78,28%
2023	4.245.924.121.376	5.340.465.513.179	79,51%
2024	4.391.696.983.728	5.499.006.330.559	79,86%

Sumber: Data APBD 2020-2024 diolah (2026)

Tabel 6. Rasio Keserasian Belanja Modal Kota Semarang

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio
2020	506.420.330.795	4.128.912.545.760	12,26%
2021	953.669.847.701	4.764.035.946.156	20,02%
2022	1.048.844.590.189	4.871.946.697.040	21,53%
2023	1.089.358.396.203	5.340.465.513.179	20,40%

2024	1.103.981.680.801	5.499.006.330.559	20,08%
------	-------------------	-------------------	--------

Sumber: Data APBD 2020-2024 diolah (2026)

Rasio Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan hasil perhitungan rasio desentralisasi fiskal Kota Semarang tahun 2020–2024, diketahui bahwa rasio desentralisasi fiskal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan kategori baik hingga sangat baik. Pada tahun 2020 rasio sebesar 46,01% dan meningkat menjadi 49,47% pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 rasio meningkat menjadi 51,23%, kemudian terus meningkat pada tahun 2023 sebesar 52,97% dan tahun 2024 sebesar 55,16%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah semakin besar sehingga kemampuan Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan desentralisasi fiskal semakin baik. Tingginya rasio tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, serta berkembangnya aktivitas perdagangan, jasa, industri, dan investasi daerah setelah pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah secara mandiri sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin rendah. Agar rasio desentralisasi fiskal tetap meningkat, pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi digitalisasi pajak dan retribusi daerah, meningkatkan investasi dan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat pengawasan pengelolaan pendapatan daerah agar penerimaan PAD terus tumbuh secara berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal yang kuat dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah (Kharisma, 2013).

Tabel 7. Rekapitulasi Rasio Desentralisasi Fiskal Kota Semarang Tahun Anggaran 2020-2024

Tahun	Realisasi PAD	APBD	Rasio	Keterangan
2020	2.024.537.808.307	4.400.520.838.480	46,01%	Baik
2021	2.385.944.758.477	4.822.887.281.737	49,47%	Baik
2022	2.545.991.747.658	4.969.436.543.013	51,23%	Sangat Baik
2023	2.835.150.144.867	5.352.871.275.779	52,97%	Sangat Baik
2024	2.885.774.306.352	5.231.593.814.823	55,16%	Sangat Baik

Sumber: Data primer diolah (2026)

KESIMPULAN

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang tahun 2020–2024 menunjukkan kondisi yang relatif baik dilihat dari berbagai rasio keuangan daerah. Pada rasio kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Kota Semarang berada pada pola hubungan delegatif dengan tingkat kemandirian yang sangat tinggi, sehingga menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara mandiri dengan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang rendah. Rasio efektivitas juga menunjukkan hasil yang efektif hingga sangat efektif, yang berarti pemerintah daerah mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Pada rasio pertumbuhan, PAD, belanja operasional, dan belanja modal mengalami pertumbuhan positif meskipun bersifat fluktuatif akibat pengaruh pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi, serta perubahan kebijakan pembangunan daerah. Sementara itu, rasio keserasian menunjukkan bahwa proporsi belanja operasional masih lebih besar dibandingkan belanja modal, meskipun belanja modal mengalami peningkatan pascapandemi sebagai bentuk percepatan pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi daerah. Pada rasio desentralisasi fiskal, Pemerintah Kota Semarang berada pada kategori baik hingga sangat baik karena kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah terus meningkat setiap tahunnya, sehingga menunjukkan kemampuan fiskal daerah yang semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kondisi keuangan daerah yang baik, pemerintah daerah tidak harus memperoleh hasil tertinggi pada seluruh rasio, melainkan perlu menjaga keseimbangan antarindikator keuangan daerah. Setiap rasio memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda sehingga terdapat beberapa rasio yang perlu ditingkatkan dan ada pula yang perlu dikendalikan agar tidak terlalu tinggi. Rasio kemandirian, efektivitas, pertumbuhan PAD, dan desentralisasi fiskal sebaiknya terus ditingkatkan karena menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan secara mandiri dan memperkuat kapasitas fiskal daerah. Namun, pada rasio keserasian, pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal. Belanja operasional yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pembangunan daerah menjadi

kurang optimal, sedangkan peningkatan belanja modal yang produktif dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang perlu terus melakukan optimalisasi PAD, meningkatkan efisiensi belanja operasional, memperbesar proporsi belanja modal yang produktif, serta memperkuat inovasi pengelolaan keuangan daerah agar stabilitas dan kualitas kinerja keuangan daerah dapat terus terjaga secara berkelanjutan.

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode analisis yang lebih mendalam, seperti analisis komparatif, regresi, atau pengukuran efisiensi keuangan daerah sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan sampel dengan membandingkan beberapa kabupaten atau kota di berbagai daerah agar hasil penelitian lebih representatif dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pengelolaan keuangan daerah secara lebih menyeluruh. Penelitian selanjutnya juga disarankan menggunakan periode penelitian yang lebih panjang agar dapat melihat tren perkembangan kinerja keuangan daerah secara berkelanjutan, serta menambahkan variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi, jumlah penduduk, dan kualitas pelayanan publik untuk memperoleh hasil analisis yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- A, S., & Maylani, D. A. (2024). Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 390–404. <https://doi.org/10.53494/jira.v10i2.408>
- Ahsanul Habibi, K., Intikhanah, S., & Hidayah, R. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemi COVID19. *Majalah Neraca*, 122–148.
- Arifah Nasution, Mutiara Alif, & Hrp, N. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Melalui Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 173–183. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v2i2.1555>
- Barraq, H., Fatah, Z., Dwijosusilo, K., & Widyawati. (2024). *Inovasi Digitalisasi Pajak Daerah Melalui Pengembangan Aplikasi PAKINTA oleh Dinas Pendapatan Kota Makassar untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*.

- 2(2), 306–312.
- Dewi, N. P. R., Werastuti, D. N. S., & Diatmika², I. P. G. (2026). *Analisis Rasio Pertumbuhan, Kesenjangan, Dan Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024*. 16–23.
- Dude, D. P., Kumenaung, A., & Rotinsulu, D. (2014). Analisis Kinerja Keuangan dan Fiskal Illusion Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2003-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 29–43.
- Hanik, F. U., & Karyanti, T. D. (2014). Analisis Rasio Keuangan Daerah sebagai Penilaian Kinerja. *Jurnal Akuntansi, Bisnis & Perbankan Indonesia (JABPI)*, 22(2), 143–156.
- Hidayatuzzahroh, A., & Lisiantara, G. A. (2024). *Pengaruh Rasio Kemandirian Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023)*. 2, 306–312.
- Karina, N. N., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 14(2), 146–166. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v14i2.4512>
- Kartika, Y. (2023). *Kinerja Keuangan Daerah: Tinjauan Rasio Kemandirian, Efektifitas, Efisiensi, dan Share and Growth*. 3(2), 110–119.
- Kharisma, B. (2013). Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi : Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 14(2), 101–119.
- Kusumaningsih, F. R., Umar, M. J., Hanum, F., Arum, A., Fariz, T. R., & Amalia, A. V. (2023). Dampak Banjir Pasang Surut (Rob) Terhadap Masyarakat Pesisir Di Kota Semarang. *Proceeding Seminar Nasional IPA XIII*, 695–702.
- PPID. (2020). *Laporan Keuangan Hasil Audit Kota Semarang*. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 10 Mei 2026. [Laporan Keuangan Hasil Audit \(Neraca, Realisasi Anggaran \(LRA\), Daftar Aset Dan Inventaris, Catatan Atas Laporan Keuangan \(CALK\) \) - PPID Kota Semarang](#)
- Machmud, et al. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 1–13.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
- Romadhan, R. (2024). *Menakar Kemandirian Fiskal Daerah dengan Flypaper Effect di Indonesia Tahun 2024*. 4(2), 151–165.
- Ropa, M. O. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 738–747.
- Saputro, R. Y., Devkhan, I., Saputra, P., & Raharjo, T. H. (2025). *Analisis Potensi Sektor Ekonomi Unggulan Di Kota Semarang*. <https://doi.org/10.15294/ak.v2i1.362>
- Satrio, D. F., & Digdowiseiso, K. (2023). Analisis Rasio Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(2), 991–1010. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i2.50301>

- Semarang, B. K. (2021). *Indikator Ekonomi Kota Semarang 2020*. BPS Kota Semarang.
- Semarang, B. K. (2024). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Semarang Menurut Lapangan Usaha 2019-2023*. BPS Kota Semarang.
- Sumastuti, E., Nariyanti, E., & Indriasari, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2013-2017. *Indicators: Journal of Economic and Business*, 2(2), 302-309. <https://doi.org/10.47729/indicators.v2i2.67>
- Waryanto, P. (2024). *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. 2, 306-312.
- Wijayanti, H., & Fuad, K. (2025). Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah melalui Rasio Keuangan : Studi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(5), 2314-2322.
- Yuniza, M. E., Nandita, Putri, N. N. D. R., Putri, G. T., & Inggawati, M. P. (2022). Kebijakan Refocusing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Pemerintah Daerah Di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10(1).